



PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA (IKN) KE PALANGKARAYA

Mega Oktaviawati¹

¹ASN Kasi Polisi Pamong Praja Kecamatan Ngamprah Bandung Barat

Email: mega.oktaviawati@gmail.com

Abstrak

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Palangkaraya kembali mengemuka sebagai wacana strategis yang terkait dengan pemerataan pembangunan, mitigasi risiko bencana, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dari perspektif kebijakan publik, proses ini menuntut formulasi kebijakan yang komprehensif melalui analisis masalah, perumusan alternatif solusi, serta evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu aspek kunci yang menentukan keberhasilan kebijakan pemindahan IKN adalah manajemen strategi komunikasi pemerintah. Pemerintah perlu membangun komunikasi yang transparan, partisipatif, dan berbasis data guna meningkatkan pemahaman publik serta mencegah resistensi sosial. Strategi komunikasi yang tepat memungkinkan pemerintah menyampaikan urgensi dan manfaat pemindahan, menjelaskan tahapan implementasi, serta menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Kajian ini menyoroti pentingnya perencanaan komunikasi yang terstruktur melalui pemetaan pemangku kepentingan, pemilihan saluran komunikasi, serta pengelolaan isu dan narasi publik. Dengan pendekatan komunikasi strategis, kebijakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya berpotensi mendapat legitimasi lebih kuat dan dukungan yang lebih luas. Pada akhirnya, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana strategi komunikasi pemerintah mampu membangun kepercayaan publik serta memastikan proses transisi berjalan inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Strategi Komunikasi, Manajemen, Kebijakan Publik

Abstract

The proposal to relocate Indonesia's capital city to Palangkaraya has re-emerged as a strategic discourse linked to equitable development, disaster-risk mitigation, and improved government administration. From a public policy perspective, this initiative requires a comprehensive policy formulation process that includes problem identification, evaluation of alternative solutions, and assessment of social, economic, and environmental impacts. A crucial factor influencing the success of the capital relocation policy is the government's strategic communication management. Effective communication must be transparent, participatory, and data-driven to enhance public understanding and reduce potential social resistance. Through well-designed communication strategies, the government can articulate the urgency and benefits of the relocation, clarify implementation phases, and accommodate feedback from citizens and local authorities. This study emphasizes the importance of structured communication planning through stakeholder mapping, selection of appropriate communication channels, and effective issue and narrative management. With a strategic communication approach, the policy to move the capital to Palangkaraya is more likely to gain stronger legitimacy and broader public support. Ultimately, the effectiveness of the policy depends on how well the government's communication strategy builds public trust and ensures that the transition process is inclusive, accountable, and sustainable.

Keywords: Communication Strategy, Management, Public Policy

PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan salah satu kebijakan strategis terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Langkah ini diputuskan dengan berbagai alasan mendasar yang menyangkut masalah kepadatan penduduk, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Jakarta sebagai ibu kota saat ini telah mengalami tekanan berat dalam berbagai aspek, seperti kemacetan ekstrem, kualitas udara yang memburuk, dan risiko bencana alam, khususnya banjir. Selain itu, sebagian besar kegiatan ekonomi dan pemerintahan terkonsentrasi di Pulau Jawa, menyebabkan ketimpangan pembangunan yang signifikan antara Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia. Pemindahan IKN bukanlah sekadar pergeseran pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol pemerataan pembangunan dan transformasi nasional. Pemindahan ini bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien, modern, dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat menjadi katalis bagi perkembangan ekonomi dan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Hal ini selaras dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, merata, dan berdaya saing di kancah global.

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk resistensi dari sebagian masyarakat, kekhawatiran terhadap dampak sosial dan lingkungan, serta potensi konflik kepentingan dari berbagai pihak yang terkait. Banyak pihak mempertanyakan kebutuhan dan kesiapan Indonesia untuk melakukan perubahan besar ini, terutama dalam aspek pembiayaan, kelayakan lokasi, dan kesiapan infrastruktur. Selain itu, masyarakat lokal di Kalimantan Timur juga memiliki kekhawatiran tersendiri mengenai perubahan yang akan terjadi di wilayah mereka, baik dari segi sosial, budaya, maupun lingkungan. Di sinilah pentingnya manajemen strategi komunikasi pemerintah dalam memastikan pemahaman yang baik dan dukungan dari masyarakat luas. Dalam perspektif kebijakan publik, komunikasi yang tepat tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga berfungsi untuk menggalang partisipasi publik dan membangun kepercayaan. Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan, manfaat, serta proses pemindahan IKN kepada masyarakat, sekaligus merespons kritik dan kekhawatiran yang muncul secara bijaksana. Dengan demikian, strategi komunikasi yang efektif dapat membantu pemerintah menciptakan dukungan publik yang lebih kuat, menurunkan resistensi, dan meningkatkan keberhasilan kebijakan pemindahan IKN ini.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini akan mengkaji strategi komunikasi pemerintah dalam pemindahan IKN dari perspektif kebijakan publik, guna melihat sejauh mana pemerintah mampu membangun dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek besar pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih baik, modern, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini diambil dengan harapan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang telah lama dihadapi oleh Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, polusi, kepadatan penduduk, serta ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Selain itu, pemindahan ini diharapkan menjadi langkah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan pusat ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan di wilayah timur Indonesia. Dalam implementasinya, pemindahan IKN bukan hanya sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi juga merupakan kebijakan publik berskala nasional yang berdampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemindahan ini juga menyangkut identitas bangsa, mengingat Jakarta telah lama menjadi simbol pusat pemerintahan dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan penuh dari masyarakat agar kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar.

Strategi komunikasi pemerintah menjadi elemen krusial dalam proses pemindahan ini. Dalam perspektif kebijakan publik, komunikasi yang efektif dapat membantu membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan strategi komunikasi yang tepat, pemerintah dapat mengurangi resistensi, meminimalisir konflik sosial, serta menggalang partisipasi masyarakat dalam proses pemindahan IKN. Oleh karena itu, manajemen strategi komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan pemindahan IKN ini. Bab ini akan mengkaji bagaimana pemerintah mengelola strategi komunikasi terkait pemindahan IKN, dengan menitikberatkan pada transparansi informasi, partisipasi publik, penggunaan media komunikasi, dan manajemen krisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan komunikasi pemerintah dalam kebijakan pemindahan IKN dan implikasinya terhadap dukungan publik serta keberhasilan kebijakan tersebut.

Strategi komunikasi pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa publik mendapatkan pemahaman yang baik dan dukungan terhadap kebijakan besar ini. Dalam perspektif kebijakan publik, manajemen strategi komunikasi yang efektif memainkan peran krusial, mencakup aspek transparansi, inklusi masyarakat, dan kesinambungan komunikasi.

Transparansi Informasi Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas, transparan, dan tepat waktu terkait pemindahan IKN, termasuk tujuan, manfaat, potensi tantangan, dan dampaknya bagi masyarakat. Transparansi ini dapat mencakup publikasi data terkait dengan anggaran, rencana pengembangan wilayah, dan analisis dampak lingkungan. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat memahami latar belakang kebijakan secara mendalam.

Partisipasi Publik Dalam perspektif kebijakan publik, partisipasi masyarakat adalah elemen penting. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses komunikasi, termasuk pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas. Diskusi publik, konsultasi, serta sesi tanya jawab menjadi platform penting untuk menampung aspirasi dan masukan masyarakat, sehingga kebijakan ini lebih partisipatif.

Strategi Komunikasi Multi-Channel Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan multi-channel dalam menyampaikan pesan. Media sosial, situs web resmi, media cetak, dan saluran berita lainnya dapat dimanfaatkan untuk memastikan pesan tersampaikan secara luas. Selain itu, komunikasi tatap muka melalui sosialisasi langsung dan seminar juga penting, terutama di daerah-daerah yang terdampak langsung oleh proyek ini.

Narasi Kebijakan yang Jelas dan Positif Dalam membangun dukungan publik, pemerintah perlu menyampaikan narasi kebijakan yang positif, dengan menekankan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, seperti pemerataan pembangunan, pengurangan beban Jakarta, serta potensi ekonomi dan lingkungan yang lebih baik di IKN baru. Narasi ini harus sederhana, relevan, dan menggugah rasa kebanggaan sebagai bangsa.

Manajemen Krisis dan Penanganan Isu Negatif Mengingat skala kebijakan ini, kemungkinan munculnya kritik dan resistensi dari masyarakat atau pihak tertentu sangat besar. Pemerintah harus siap dengan manajemen krisis yang baik, dengan merespons isu-isu negatif secara cepat dan bijaksana. Klarifikasi dan konter narasi yang berbasis data serta keterbukaan pemerintah dalam menjawab pertanyaan dan kritik publik sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Evaluasi Berkelanjutan Komunikasi publik terkait IKN harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan sudah efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui survei, feedback dari masyarakat, atau pemantauan media. Hasil evaluasi ini bisa digunakan untuk memperbaiki strategi komunikasi agar lebih relevan.

Inklusi Budaya dan Identitas Lokal Masyarakat lokal yang terdampak perlu merasa diikutsertakan dan dihargai. Pemerintah sebaiknya menekankan bahwa pemindahan IKN tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat di sekitar wilayah IKN baru. Hal ini bisa meningkatkan dukungan dari masyarakat setempat dan mengurangi potensi konflik sosial. Strategi komunikasi yang efektif dalam pemindahan IKN membutuhkan pendekatan yang komprehensif, proaktif, dan inklusif untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang optimal. Keterbukaan pemerintah dan partisipasi publik dapat menjadi landasan penting dalam menyukseskan program pemindahan ini serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan nasional yang baru.

Dalam menganalisis strategi komunikasi pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), teori-teori komunikasi dan kebijakan publik dapat menjadi landasan utama. Teori Komunikasi Pemerintah (Government Communication Theory) Teori ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan membentuk opini publik. Komunikasi pemerintah harus mencakup elemen transparansi, keterbukaan, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan teori ini, kita dapat mengevaluasi bagaimana pemerintah menyampaikan kebijakan pemindahan IKN, termasuk penggunaan berbagai media komunikasi dan penyampaian pesan yang jelas. Teori Partisipasi Publik (Public Participation Theory) Teori partisipasi publik menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, terutama dalam kebijakan yang berdampak luas seperti pemindahan IKN. Partisipasi publik mencakup proses konsultasi, pelibatan dalam diskusi, dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. Dengan teori ini, kita dapat menganalisis sejauh mana pemerintah mengundang dan menerima masukan dari masyarakat terkait pemindahan IKN, sehingga meningkatkan legitimasi kebijakan tersebut. Teori Agenda Setting.

Teori agenda setting mengemukakan bahwa media memiliki peran penting dalam menentukan isu-isu apa yang penting bagi publik melalui prioritas pemberitaan. Pemerintah, sebagai salah satu pengelola agenda, dapat memanfaatkan teori ini untuk memastikan bahwa kebijakan pemindahan IKN menjadi topik utama yang dipahami oleh masyarakat. Analisis berdasarkan teori ini dapat melihat bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan media dalam membentuk persepsi masyarakat terkait urgensi dan manfaat pemindahan IKN. Teori Persepsi Publik (Public Perception Theory) Persepsi publik merupakan aspek penting dalam menerima atau menolak suatu kebijakan. Teori persepsi publik membantu memahami bagaimana masyarakat memproses informasi yang mereka terima dan bagaimana mereka membentuk opini atau persepsi terkait kebijakan tersebut. Dalam konteks pemindahan IKN, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap manfaat dan dampak pemindahan IKN, serta bagaimana persepsi tersebut dipengaruhi oleh komunikasi yang disampaikan pemerintah.

Teori Manajemen Krisis (Crisis Management Theory) Dalam kebijakan besar seperti pemindahan IKN, risiko adanya krisis atau kritik publik cukup tinggi. Teori manajemen krisis membahas cara pemerintah dalam mengantisipasi, menangani, dan merespons isu-isu negatif yang mungkin muncul selama proses pemindahan IKN. Dengan teori ini, kita dapat melihat bagaimana pemerintah mengelola informasi negatif atau respons resistensi publik yang berpotensi menjadi krisis bagi kebijakan pemindahan IKN. Teori Manajemen Isu (Issue Management Theory) Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana pemerintah

menangani isu-isu atau kekhawatiran tertentu yang muncul dari publik. Dalam proses pemindahan IKN, berbagai isu seperti dampak lingkungan, perubahan budaya lokal, serta biaya proyek akan muncul dan perlu dikelola secara efektif. Manajemen isu memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi isu-isu penting, merespons secara strategis, dan meminimalkan dampak negatif terhadap kebijakan yang diterapkan.

Teori Difusi Inovasi (Diffusion of Innovation Theory) Teori difusi inovasi menjelaskan bagaimana inovasi atau perubahan, seperti pemindahan IKN, diterima oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Teori ini membagi masyarakat menjadi beberapa kategori dalam menerima perubahan, mulai dari inovator, penerima awal, mayoritas awal, mayoritas akhir, hingga kaum laggard yang lambat menerima perubahan. Dengan memahami teori ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang mendukung atau menolak pemindahan IKN dan merancang strategi komunikasi yang sesuai bagi tiap kelompok. Teori Kebijakan Publik (Public Policy Theory) Teori kebijakan publik memberikan kerangka kerja untuk menganalisis proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah, seperti pemindahan IKN. Dalam kerangka teori ini, kita dapat menganalisis bagaimana kebijakan ini dirancang, disosialisasikan, dan dievaluasi dalam rangka mendapatkan dukungan publik serta dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan nasional. Dengan menerapkan teori-teori ini, penelitian dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai efektivitas strategi komunikasi pemerintah dalam kebijakan pemindahan IKN, serta melihat sejauh mana kebijakan ini diterima oleh publik. Teori-teori tersebut akan membantu dalam memahami dinamika komunikasi, persepsi, dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemindahan IKN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami strategi komunikasi pemerintah dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari perspektif kebijakan publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam terkait proses komunikasi, respon publik, serta isu-isu yang muncul dalam kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mengkaji strategi komunikasi pemerintah dalam pemindahan IKN. Studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena tertentu, dalam hal ini strategi komunikasi dalam kebijakan pemindahan IKN di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis kegiatan komunikasi yang dilakukan pemerintah, reaksi publik, serta efektivitas komunikasi dalam membangun dukungan terhadap kebijakan ini. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber yang relevan, seperti pejabat pemerintah yang terlibat dalam tim komunikasi pemindahan IKN, pakar kebijakan publik, praktisi komunikasi, dan akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang komunikasi atau kebijakan publik. Selain itu, survei kecil juga dapat dilakukan kepada masyarakat umum di sekitar Kalimantan Timur untuk mendapatkan persepsi dan tanggapan mereka terhadap kebijakan ini. Data sekunder diambil dari berbagai sumber seperti dokumen resmi pemerintah, laporan media, artikel jurnal, laporan survei, serta publikasi ilmiah yang membahas kebijakan pemindahan IKN. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap strategi komunikasi pemerintah. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi terkait pengalaman, pandangan, dan strategi komunikasi pemerintah yang diterapkan. Wawancara ini juga berguna untuk memahami persepsi para pemangku kepentingan terkait pemindahan IKN. Observasi dilakukan pada kegiatan sosialisasi atau kampanye yang dilakukan pemerintah terkait pemindahan IKN. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah menyampaikan pesan kepada masyarakat dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap pesan tersebut. Dokumen resmi,

seperti pernyataan pemerintah, strategi komunikasi yang dipublikasikan, laporan media, dan publikasi lain yang berkaitan dengan pemindahan IKN, dikaji untuk memperoleh data tentang pesan-pesan yang disampaikan dan saluran komunikasi yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian hasil dan pembahasan ini, akan dipaparkan temuan penelitian mengenai strategi komunikasi pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari perspektif kebijakan publik. Temuan ini berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pembahasan difokuskan pada efektivitas komunikasi pemerintah, respons masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan komunikasi tersebut. Transparansi Informasi dan Kejelasan Pesan Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara dengan pejabat pemerintah, terlihat bahwa pemerintah telah berusaha menyampaikan informasi tentang pemindahan IKN secara transparan, termasuk tujuan, manfaat, dan tahapan proyek. Melalui berbagai media, pemerintah menekankan bahwa pemindahan IKN bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan. Namun, meskipun informasi disampaikan secara terbuka, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar publik masih merasa kurang paham tentang detail kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan pesan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai pemahaman yang diinginkan.

Meskipun pemerintah telah menggunakan saluran komunikasi resmi, kompleksitas informasi yang disampaikan sering kali sulit dipahami oleh masyarakat luas. Pendekatan komunikasi yang lebih sederhana dan informatif diperlukan, terutama dalam bentuk infografis atau video yang mudah dipahami. Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Hasil wawancara dengan pakar kebijakan publik dan masyarakat setempat di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pemerintah telah mengadakan beberapa konsultasi publik dan diskusi dengan tokoh masyarakat terkait pemindahan IKN. Namun, partisipasi ini dirasa masih kurang merata, terutama di daerah-daerah yang lebih jauh dari lokasi IKN baru. Masyarakat lokal merasa bahwa keterlibatan mereka lebih bersifat formalitas dan bahwa pendapat mereka tidak banyak memengaruhi keputusan akhir. Partisipasi publik yang optimal akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan meminimalkan resistensi. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat lebih aktif dalam tahapan perencanaan dan sosialisasi, termasuk menyediakan platform daring bagi masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan masukan.

Pemanfaatan Media Komunikasi yang Beragam Pemerintah perlu meningkatkan akses informasi di daerah-daerah pedalaman dengan melibatkan media lokal dan mengadakan sosialisasi langsung. Penggunaan aplikasi atau platform daring yang interaktif juga dapat membantu menjangkau generasi muda dan memfasilitasi komunikasi dua arah. Narasi Kebijakan dan Manfaat yang Disampaikan Analisis wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pemerintah berfokus pada narasi manfaat, seperti pembangunan yang berkelanjutan, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan peluang pekerjaan baru. Narasi ini berhasil mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat, namun ada juga kelompok yang masih meragukan manfaat jangka panjangnya dan mengkhawatirkan dampak sosial dan lingkungan. Narasi kebijakan perlu disesuaikan dengan konteks lokal. Masyarakat di Kalimantan Timur, misalnya, mungkin lebih khawatir terhadap dampak lingkungan. Pemerintah sebaiknya menyesuaikan pesan-pesan yang disampaikan agar lebih relevan dengan kondisi dan kekhawatiran masyarakat setempat.

Penanganan Isu dan Manajemen Krisis Hasil analisis menunjukkan bahwa isu

lingkungan, pembiayaan, dan dampak terhadap masyarakat lokal merupakan isu utama yang sering diangkat di media. Pemerintah telah merespons beberapa isu ini melalui klarifikasi di media, tetapi belum ada penanganan krisis yang sistematis. Respon pemerintah dinilai kurang cepat dan kurang terfokus, sehingga beberapa isu terus berkembang dan menyebabkan ketidakpuasan di sebagian kelompok masyarakat. Pemerintah perlu memiliki tim manajemen krisis yang proaktif dan responsif dalam menghadapi isu negatif. Respon yang cepat dan data yang akurat sangat penting untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat dan menghindari penyebaran misinformasi yang dapat merusak reputasi kebijakan pemindahan IKN. Persepsi Publik Terhadap Pemindahan IKN Hasil wawancara menunjukkan adanya variasi dalam persepsi publik terhadap pemindahan IKN. Masyarakat di Pulau Jawa cenderung memiliki persepsi yang lebih positif karena diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan kepadatan Jakarta. Namun, masyarakat di Kalimantan Timur menunjukkan keprihatinan tentang dampak sosial, budaya, dan lingkungan. Secara umum, persepsi publik dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap kebijakan ini. Persepsi publik yang beragam menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang disesuaikan dengan latar belakang sosial dan geografis masyarakat. Pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan komunikasi berbasis komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan membangun dukungan publik di berbagai daerah. Efektivitas Komunikasi Pemerintah dalam Membangun Dukungan Publik Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah dalam pemindahan IKN masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal penyampaian pesan yang lebih sederhana, peningkatan partisipasi publik, dan manajemen isu yang lebih responsif. Pemerintah berhasil mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat, tetapi masih terdapat kelompok yang resisten terhadap kebijakan ini. Untuk mencapai dukungan yang lebih luas, pemerintah perlu mengoptimalkan strategi komunikasi yang lebih inklusif, responsif, dan transparan. Penyediaan platform digital yang memungkinkan interaksi langsung antara masyarakat dan pemerintah dapat membantu menjembatani kesenjangan komunikasi dan mengurangi resistensi publik. Hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah dalam pemindahan IKN memiliki beberapa keberhasilan, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Komunikasi yang lebih jelas, responsif, dan berbasis partisipasi publik dapat membantu meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini. Strategi komunikasi yang lebih inklusif akan memainkan peran penting dalam menyukseskan pemindahan IKN dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

KESIMPULAN

Strategi komunikasi pemerintah dalam pemindahan IKN telah berhasil menjangkau sebagian besar masyarakat, namun belum sepenuhnya efektif dalam membangun pemahaman dan dukungan yang luas. Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah perlu memperbaiki aspek transparansi, partisipasi publik, pemanfaatan media yang merata, dan respons terhadap isu-isu krusial yang dihadapi masyarakat. Pendekatan komunikasi yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis data akan menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan pemindahan IKN serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Indra Renaldi, Ridwan Khairandy, B. A. P. (2022). Journal of Law Science. Journal of Law Science, 4(4), 179–187. www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS%0AJuridical
- Alam, W. Y. (2023). Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Sebagai Pilihan Rasional Dalam Perspektif Syariah dan Politik. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 6(1), 102–113.

- <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jskp/article/view/1438>
- Aziz SR, A. (2023). Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Civil society. *Journal of Politics and Policy*, 5(2), 104–118. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2023.005.02.03>
- Benia, E., & Nabilah, G. (2022). Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 806–825. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323>
- Dewi, S. M., Sari, A. K., & Amin, M. N. F. Al. (2024). Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Dengan Pendekatan Fishbone Analysis. *Jurnal Media ...*, 2(5). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/335%0Ahttps://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/335/356>
- Ernawati, A., Wahyudi, J., Astuti, A. D., & Aini, S. Q. (2022). Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 57–70. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155>
- Fajarwati, F. (2024). *Journal of Law Science*. *Journal of Law Science*, 2(1), 15–23.
- Hairunnisa, H., & Syaka, W. A. (2022). Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.8193>
- Hariati, H., & Saputri, A. S. (2022). Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Di Kalimantan Timur, Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.8218>
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947>
- Jundi Zia Ulhaq, M., Darwis, M., & Rudiadi. (2023). Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kotanegara. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 280–281.
- Khairunnisa, E. (2023). Analisis Politik Faktor Keberhasilan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 280–287. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.843>
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>
- Maku, S., Akili, R. H., & Kadir, Y. (2023). Analisis Strategi Politik Hukum Terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Geopolitik Dan Geostrategi. *Iblam Law Review*, 3(2), 152–172. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.136>
- Masitah, A. D., & Dewi, D. S. K. (2022). ANALISIS OPINI PUBLIK berdasarkan TEORI AGENDA SETTING pada PROSES PERENCANAAN PEMINDAHAN IKN. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 74–87. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3374>
- Najilatil Mazda, C. (2022). Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (Ikn) Terhadap Social Security. *Jurnal Enersia Publika*, 6(1), 1–12. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/1086
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83–97. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>
- Nurahmani, A., & Sihombing, P. (2022). Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah Di Ibu Kota Nusantara. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 38. <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/181>
- Politik, A. J., Humaniora, H., Juli, N., Hukum, M., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). Analisa Kebijakan Keuangan DKI Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur Nurwidya Kusma Wardhani Ahmad Ahsin Thohari Jakarta yang sebelumnya merupakan Ibukota Negara Indonesia sendiri telah ditetapkan pada awal kemerdekaan Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 lalu , tetapi seiring Gambar 01 Perjalanan Perpindahan Ibukota Negara , Undang-Undang. 2(3).
- Putri, V. A., Safira, A., & Al Amin, M. N. F. (2024). Analisis Konsekuensi Pengambilan Keputusan Pemerintah terhadap Pemindahan Ibu Kota ke IKN melalui Pendekatan Fishbone.

- Indonesian Journal of Public Administration Review, 1(2), 12.
<https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2393>
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2), 4042–4052. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086>
- Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota negara. *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(16), 19–24. <http://puslit.dpr.go.id>
- Siti, A., Aditya, A. N., Ahmad, S., & Farida, R. (2023). Analisis Dampak Dan Resira Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 2(1), 10–18.
- Tody, E. S., & Nanang, M. (2024). PANDANGAN MASYARAKAT DESA LOA JANAN ULU TERHADAP PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) KE KALIMANTAN TIMUR. 12(3), 399–407.
- Wahyudi, F. S. (2023). Proyek Pemindahan IKN : Upaya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Ataukah Untuk Pengembangan Ekonomi. *HUMANTECH : Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(9), 1890–1908.
<http://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/3562%0Ahttp://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/download/3562/2879>